

**ARSITEKTUR ENTERPRISE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) PADA ARSITEKTUR BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

***ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM ENTERPRISE ARCHITECTURE
(SPBE) ON BUSINESS ARCHITECTURE IN THE REGIONAL GOVERNMENT
ENVIRONMENT OF SUKABUMI REGENCY***

Ghozali Andri Winada¹, Soni Fajar Surya Gumilang², Rahmat Mulyana³

^{1,2,3} Universitas Telkom, Bandung

andrighozali@student.telkomuniversity.ac.id¹, mustonie@telkomuniversity.ac.id²,

rahmatmoelyana@telkomuniversity.ac.id³

Abstrak

Kebutuhan akan Teknologi Informasi pada era sekarang sangatlah tinggi, salah satunya juga bidang Pemerintahan. Hal ini juga yang mendorong Pemerintahan Indonesia untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau biasa yang dikenal dengan e-government. Salah satu tujuan dari penerapan SPBE adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE sendiri mempunyai 3 level dalam penerapannya di Indonesia, yaitu tingkat pusat, tingkat instansi, dan tingkat daerah. Salah satu Kabupaten yang telah menerapkan SPBE adalah Kabupaten Sukabumi, namun tingkat maturitas yang tertera pada Portal SPBE Nasional Kabupaten Sukabumi masih rendah dan masih di tingkat kurang. Untuk itu diperlukan adanya optimalisasi TI dengan perancangan Enterprise Architecture (EA) dalam penyelenggaraan SBPE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Sesuai dengan instruksi Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018, salah satu domain penting dalam arsitektur SPBE yaitu domain proses bisnis, karena efektivitas dan efisiensi birokrasi di dalam pemerintahan sangat terkait dengan proses bisnis yang didukung dengan aplikasi, infrastruktur, dan manajemen data yang baik. Penerapan Enterprise Architecture pada penelitian ini mengacu pada arsitektur SPBE dan TOGAF ADM. Perancangan ini dimulai dari fase preliminary, architecture vision, hingga arsitektur proses bisnis yang menghasilkan artefak EA berupa matriks, katalog, dan diagram. Solusi akhir perancangan ini menghasilkan model rancangan model cetak biru domain arsitektur proses bisnis SPBE Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci: EA, SPBE, TOGAF, Arsitektur Proses Bisnis.

Abstract

The need for Information Technology in the current era is very high, one of which is also in the field of Government. This also encourages the Indonesian Government to implement the Electronic-Based Government System (SPBE) or commonly known as e-government. One of the goals of implementing SPBE is to create quality and trusted public services. SPBE itself has 3 levels in its implementation in Indonesia, namely the central level, the agency level, and the regional level. One of the districts that has implemented SPBE is Sukabumi District, but the maturity level listed on the Sukabumi District National SPBE Portal is still low and still low. For this reason, it is necessary to optimize IT by designing Enterprise Architecture (EA) in the implementation of SBPE in the Sukabumi Regency Government. In accordance with the instructions of Presidential Regulation No. 95 of 2018, one of the important domains in the SPBE architecture is the business process domain, because the effectiveness and efficiency of the bureaucracy in government is closely related to business processes that are supported by good applications, infrastructure, and data management. The application of Enterprise Architecture in this study refers to the SPBE and TOGAF ADM architectures. This design starts from the preliminary phase, architecture vision, to the business process architecture which will later produce EA artifacts in the form of matrices, catalogs, and diagrams. The final solution of this design produces a blueprint model for the domain architecture of the SPBE business process in Sukabumi Regency.

Keywords: EA, SPBE, TOGAF, Enterprise Architecture, Business Process Architecture.

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi kebutuhan akan teknologi informasi bagi sebuah organisasi atau institusi agar mampu bergerak secara dinamis dan terus mendapatkan data/informasi secara *up to date* [1]. Dengan dukungan Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) yang baik, maka suatu perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain (Hamzah B., 2010). Pemerintah juga harus bisa bersaing dengan perusahaan swasta agar tidak kalah dan tetap bisa bertahan di era dimana data dan informasi sangat cepat berubah – ubah. Pemerintah juga harus mampu dalam menyelaraskan proses bisnis yang ada dengan teknologi yang diterapkan agar mampu menciptakan layanan yang terbaik, serta terus melakukan evaluasi dan terus melakukan peningkatan layanan terhadap masyarakat. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi diciptakan agar pemerintah mampu memberikan layanan yang terbaik bagi para pengguna nya. Pelaksanaan SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar pemerintah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam penyusunan Arsitektur SPBE harus ada proses bisnis yang jelas dan mudah dimengerti. Peraturan proses bisnis di instansi pemerintah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan, 2018) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

2. Dasar Teori /Material dan Metodologi/Perancangan

2.1 Enterprise Architecture

EA adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi (Schekkerman, 2011) [2]. EA juga biasa dikenal dengan blueprint (cetak biru) dari sebuah perusahaan yang mana terdapat rancangan perusahaan untuk beberapa tahun ke depan dan terdapat rancangan dari lingkungan TI untuk menunjang fungsi bisnis yang ada. Pada EA juga memberikan pandangan umum tentang elemen yang ada berupa bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang mana menunjukkan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan satu sama lain. EA juga menyelaraskan fungsi bisnis yang ada dengan TI agar selalu berhubungan satu sama lain dan mencapai dengan tujuan awal organisasi/perusahaan (Razak, 2011)[3].

2.2 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mewajibkan seluruh instansi pemerintahan untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal e-government. Penyelenggaraan SPBE ini bertujuan untuk memaksimalkan Teknologi Informasi (TI) agar semua terpusat menjadi satu dan lebih efektif, serta memberikan tata kelola terhadap instansi – instansi yang ada di dalam pemerintahan. Didalam penerapan SPBE bertujuan memberikan panduan terhadap proses bisnis, data, infrastruktur, Aplikasi, Keamanan, serta layanan yang terpadu.



Gambar 1. Gambar *Framework* SPBE

2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemerintahan Indonesia yang memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam pengimplementasian SPBE ini pemerintah harus memperhatikan beberapa seperti harus pengelolaan tata kelola yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian secara terpadu. Manajemen pada SPBE adalah serangkaian proses untuk penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan

berkesinambungan, serta layanan yang berkualitas. Rencana induk dalam penerapan SPBE ini dilakukan secara nasional dan memiliki jangka waktu selama 20 (dua puluh tahun). Pada tahun 2019 muncul sebuah peraturan presiden baru yaitu Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 tentang satu data.

2.4 Arsitektur Bisnis Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

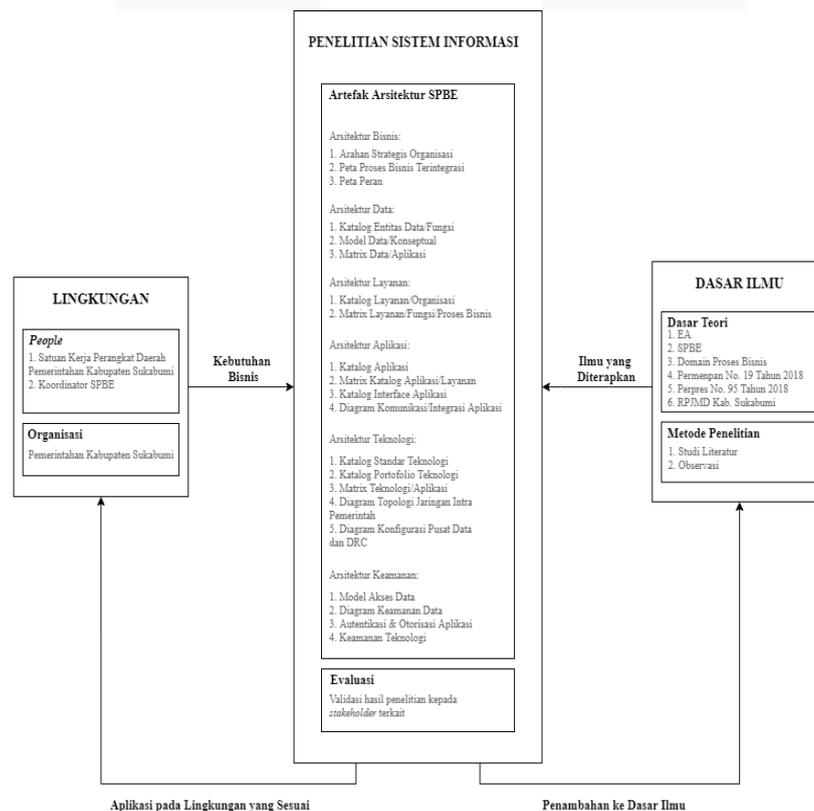
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa “Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Proses bisnis yang ada harus memiliki sifat interoperabilitas, yaitu mampu melakukan koordinasi dan kolaborasi antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE[4].

2.5 Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan[5]. Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu: definitif, urutan, pelanggan, nilai tambah, keterkaitan, fungsi silang, sederhana, dan konsensus subyektif. Peta proses bisnis sangat penting bagi instansi pemerintah karena merupakan bagian dari pelaksanaan SPBE yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas, proses; dan prosedur kerja yang jelas.

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini konsep dan kerangka kerja konseptual digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi esensi dari tujuan penelitian dan keterhubungannya. Kerangka untuk membangun model konseptual pada penelitian sistem informasi dapat menggunakan dua paradigma yang berbeda namun saling melengkapi yaitu behavioral science dan design science. Model konseptual ini diharapkan dapat memetakan arahan yang jelas terkait bagian-bagian yang ada di dalam penelitian. Model konseptual yang digambarkan untuk penelitian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu lingkungan, penelitian sistem informasi, dan dasar ilmu



Gambar 2. Model Konseptual

4. Pembahasan

4.1 Preliminary Phase

Preliminary Phase merupakan salah satu tahapan atau fase dari Enterprise Architecture yang didalamnya menjelaskan tentang tahap persiapan dan inisiasi dari aktivitas – aktivitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis pada rancangan Enterprise Architecture baru pada Pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Lalu akan dilakukan identifikasi pada setiap kebutuhan yang ada untuk menunjang dalam perancangan Enterprise Architecture.

Tabel 1 *Principle Catalog* Pemkab Sukabumi

No	Prinsip Bisnis	Deskripsi
1.	<i>Primacy of Principles</i>	Prinsip ini akan berlaku pada seluruh perangkat daerah yang berada di Kabupaten Sukabumi.
2.	<i>Information Management is Everybody's Business</i>	Seluruh perangkat daerah berpartisipasi dan selaras dalam keputusan manajemen informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan pemerintah berbasis elektronik.
3.	<i>Common Use Application</i>	Pengembangan aplikasi yang digunakan di seluruh Pemerintahan Daerah lebih disukai daripada pengembangan aplikasi serupa atau duplikatif yang hanya digunakan di perangkat daerah tertentu.
4.	<i>IT Responsibility</i>	Perangkat Daerah pengelola IT bertanggung jawab untuk menerapkan proses dan infrastruktur IT yang memungkinkan solusi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pengguna secara fungsionalitas, tingkat layanan, biaya, dan waktu pengiriman.
5.	<i>Compliance with Law</i>	Proses manajemen data dan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi harus mematuhi semua hukum, kebijakan, dan peraturan internal serta eksternal yang relevan.
6.	<i>Inovation</i>	Pemerintahan Daerah Kabupaten senantiasa mencari cara inovatif menggunakan teknologi untuk mendukung layanan pemerintah berbasis elektronik.

4.2 Architecture Vision

Fase architecture vision merupakan fase pertama di dalam cycle TOGAF ADM. Pada fase ini menjabarkan tujuan utama dan batasan pada arsitektur dalam perancangan EA, didalamnya juga termasuk ke dalam ruang lingkup arsitektur yang akan dibangun, stakeholder yang mendukung akan perancangan EA dan SPBE Pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Artefak yang akan dihasilkan pada fase ini yaitu value chain diagram dan stakeholder map matriks.



Gambar 3 Value Chain Pemkab Sukabumi

Tabel 2 Stakeholder Map Matrix

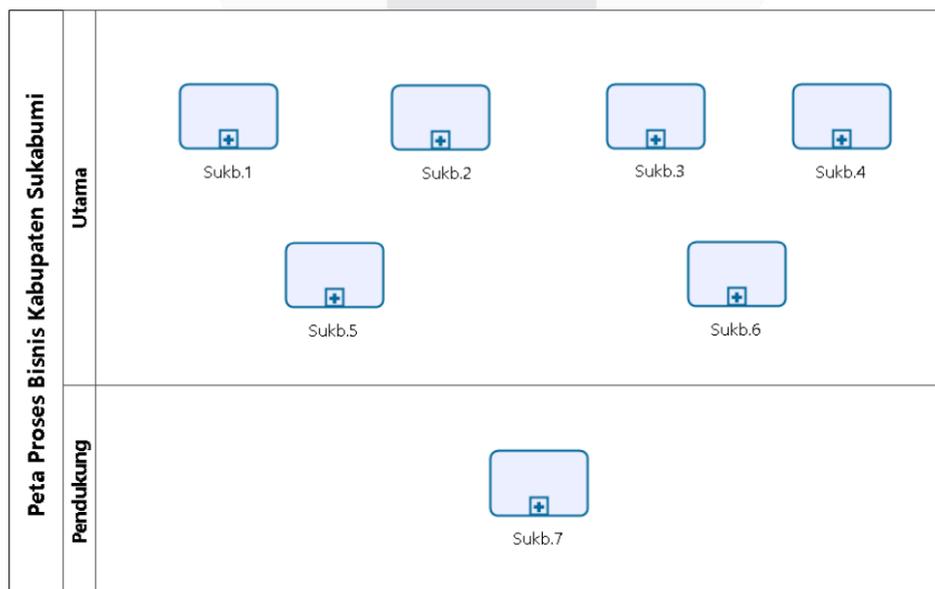
No	Stakeholder	Key Concern	Class
1	Bupati	Bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, serta menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd.	Key Player
2	Sekretariat Daerah Tipe A	Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik daerah dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik pada Sekretaris Daerah.	Keep Informed
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A	Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika dan statistik persandian, pengelolaan e-government daerah, penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik daerah, serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas.	Keep Informed
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A	Bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.	Keep Informed

4.3 Arsitektur Proses Bisnis

Tahap arsitektur proses bisnis merupakan tahapan utama dalam proses perancangan EA yang di dalamnya mendeskripsikan interaksi bisnis yang dijalankan oleh instansi untuk mencapai layanan yang terintegrasi serta tujuan yang diinginkan. Model perancangan arsitektur proses bisnis EA SPBE ini mengacu pada Amanah Perpres No. 95 tahun 2018 serta PermenPANRB No. 19 tahun 2018. Artefak yang dihasilkan pada perancangan arsitektur proses bisnis ini yaitu peta proses bisnis level 0 dan level 1 serta peta relasi.

4.3.1 Model Peta Proses Bisnis Level 0

Peta proses bisnis level 0 merupakan model peta proses bisnis yang memuat penggambaran keseluruhan proses untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi. Di dalam menentukan pemetaan peta probis level 0 Pemda Kab Sukabumi diidentifikasi berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemda Kabupaten Sukabumi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Pada proses bisnis level 0 di atas terdapat 7 proses yang digambarkan dan dinamakan dengan menggunakan kode proses yaitu Sukb (Sukabumi) yang di dalamnya merupakan sasaran yang ingin dicapai Pemda Kabupaten Sukabumi. Proses bisnis level 0 Pemda Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi dua tipe proses, yaitu proses utama dan proses pendukung. Gambar di bawah merupakan peta proses bisnis level 0 Pemda Kabupaten Sukabumi.



Gambar 4. Peta Proses Bisnis Level 0

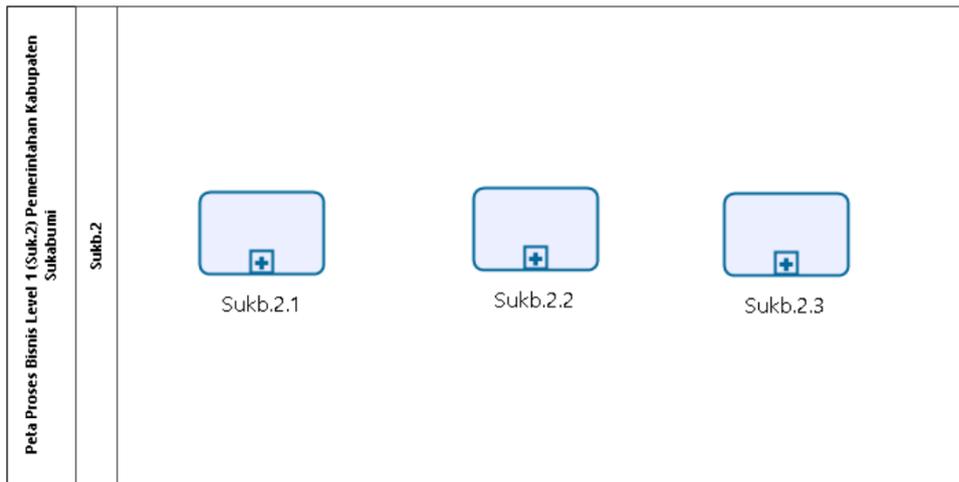
Tabel 3. Penjelasan Proses Bisnis Level 0

Kode Proses	Nama Proses	Tipe Proses
Sukb.1	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai keagamaan, keamanan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta Meningkatkan pengerustamaan perlindungan wanita dan anak	Utama
Sukb.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Utama
Sukb.3	Menurunnya tingkat pengangguran dan Menurunnya tingkat kemiskinan	Utama
Sukb.4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Utama
Sukb.5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dari sektor pertanian, pariwisata, agribisnis, perikanan dan meningkatkan skala pelaku usaha ekonomi	Utama
Sukb.6	Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Utama
Sukb.7	Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas pelayanan publik	Pendukung

4.3.2 Model Peta Proses Bisnis Level 1

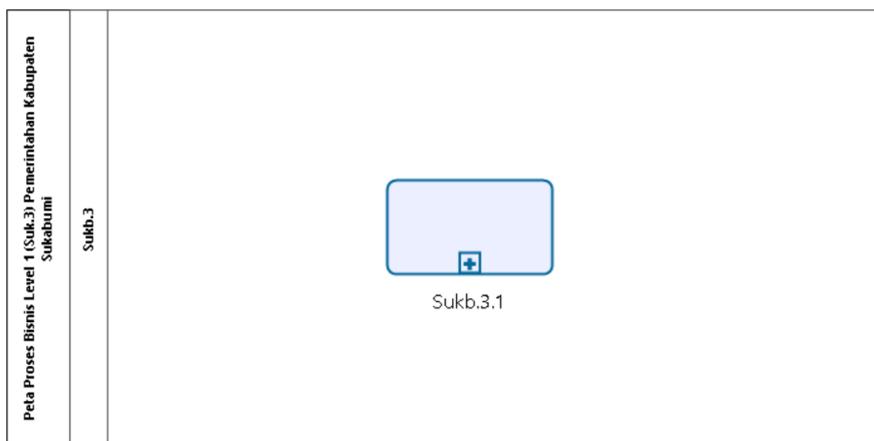
Peta proses bisnis level 1 merupakan proses bisnis yang didalamnya terdapat sub-proses sebagai penggambaran terperinci dari setiap proses yang ada di proses level 0. Dalam menentukan peta proses bisnis level 1 pada Pemerintahan Kabupaten Sukabumi diidentifikasi berdasarkan program prioritas yang ada pada RPJMD Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2021 – 2026. Proses yang digambarkan ke level 1 pada penelitian ini dibatasi hanya untuk proses Sukb 2,3, dan 4

Pada gambar 5 menggambarkan proses yang lebih detail dari Proses Bisnis Sukb.2 yaitu Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat 3(tiga) sub-proses yang merupakan program prioritas yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu, Program Pelayanan Kesehatan gratis di Puskesmas, Program Pelayanan Kesehatan Keliling (Dokter masuk kampung), dan Program Jaminan kesehatan masyarakat miskin dan Kades / Perangkat Desa.



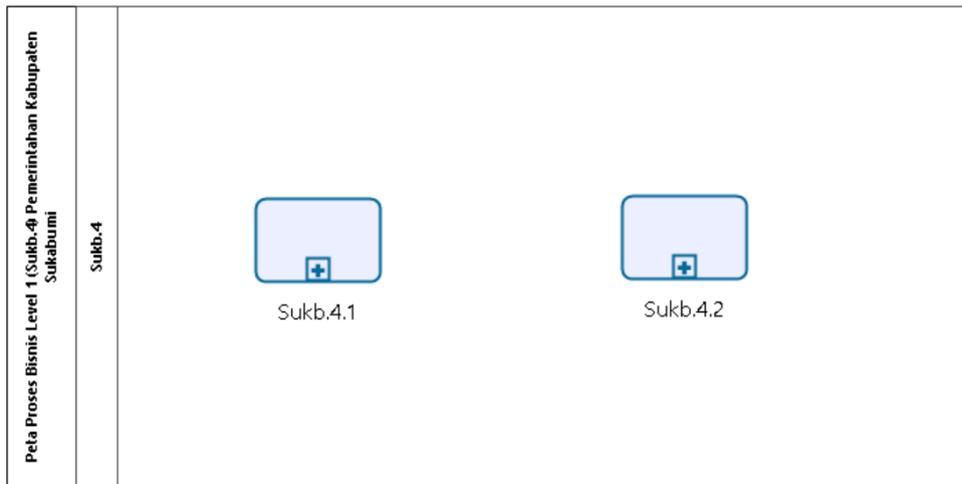
Gambar 5. Peta Proses Bisnis Level 1 Sukb.2

Pada gambar 6 menggambarkan proses yang lebih detail dari proses bisnis Sukb.3 yaitu Menurunnya tingkat pengangguran dan Menurunnya tingkat kemiskinan. Di dalamnya terdapat sebuah sub-proses yang merupakan program prioritas yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu, Program Pengembangan pusat ketenagakerjaan yang terintegrasi (SILENT Center : Sukabumi Integrated Labour and Employment Center).



Gambar 6. Peta Proses Bisnis Level 1 Sukb.3

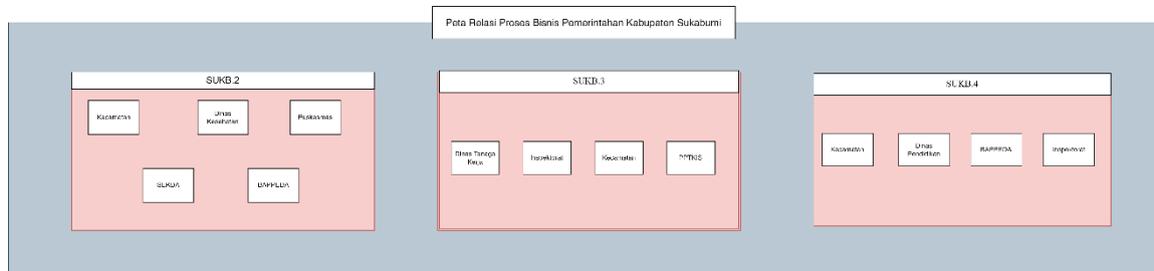
Pada gambar 7 menggambarkan proses yang lebih detail dari proses bisnis Sukb.4 yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan. Di dalamnya terdapat 2 (dua) sub-proses yang merupakan program prioritas yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu, Program Beasiswa kedokteran, dan Program Peningkatan BOP PAUD.



Gambar 7. Peta Relasi Proses Bisnis Level 1 Sukb.4

4.3.3 Peta Relasi Proses Bisnis

Peta relasi proses bisnis merupakan sebuah peta yang menggambarkan pihak mana saja yang terlibat dalam setiap proses yang telah ter gambarkan pada peta proses bisnis. Penggambaran berdasarkan peta proses bisnis level 0 yang mana dimulai dari proses utama hingga proses pendukung. Penggambaran mulai dari Sukb.2,3, dan 4 berikut merupakan penggambaran peta relasi proses bisnis di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.



Gambar 8. Peta Relasi Proses Bisnis

4.3.4 Gap Analysis

Gap Analysis Arsitektur Proses Bisnis mempunyai tujuan untuk mengukur sejauh mana pengguna dapat memenuhi requirement yang ada dan dapat dijadikan bahan untuk pengembangan arsitektur berikutnya. Tabel di bawah merupakan identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui Gap di arsitektur bisnis, berikut merupakan penjelasannya.

Tabel 4. Gap Analysis

No	Requirement	Fulfilment			Keterangan	Target Solusi
		N	P	F		
1.	Penerapan prinsip manajemen TI SPBE pada setiap proses bisnis dan seluruh OPD		V		Prinsip manajemen TI dan SPBE belum diterapkan secara penuh oleh Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.	Sosialisasi/pelatihan terkait manajemen TI dan SPBE dalam setiap layanan khusus pemerintah dan layanan publik.
2.	Model Proses bisnis yang dimiliki memiliki keterkaitan yang kuat dan selaras terhadap Visi, Misi,	V			Pemerintahan Kabupaten Sukabumi belum memiliki Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan PermenpanRB No 19 Tahun 2018.	Memiliki model Peta Proses Bisnis yang menggunakan notasi sesuai dengan PermenpanRB No 19 Tahun 2018.

	dan juga Rencana Strategis					
3.	Menyelaraskan seluruh sistem bagi data untuk setiap proses bisnis oleh tiap OPD		V		Belum optimalnya setiap OPD dalam penggunaan aplikasi yang sudah ada.	Pengoptimalan dalam penggunaan aplikasi yang sudah ada dan perancangan sistem bagi pakai data.
4.	Pengintegrasian seluruh aplikasi dengan proses bisnis yang ada untuk memaksimalkan layanan		V		Masih adanya jarak pada setiap sektor sehingga belum terintegrasi aplikasi dalam proses bisnis	Melakukan perancangan integrasi antar aplikasi dalam sistem terpadu LAYANANKAMI dan BIMASAKTI
5.	Memaksimalkan sumber daya dan infrastruktur dalam implementasi TI		V		Sebagian sumber daya manusia yang dimiliki masih belum bisa menyesuaikan diri dengan penggunaan IT serta infrastruktur yang kurang memadai.	Memberi pelatihan teknis serta sertifikasi agar dapat melakukan penyesuaian terhadap penggunaan IT dan pengusulan peningkatan infrastruktur untuk memenuhi layanan SPBE.

5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dalam perancangan SPBE pada arsitektur proses bisnis di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi terdapat kesimpulan yang bisa diambil, yaitu perancangan ini berfokus pada domain proses bisnis dengan acuan utama yaitu perpres nomor 95 tentang SPBE, 2018 serta menggunakan TOGAF ADM. Dalam perancangan EA SPBE ini terdapat beberapa fase yang diantaranya adalah fase *preliminary*, fase *architecture vision*, dan fase arsitektur proses bisnis. Pada setiap fase nya terdapat beberapa artefak berupa diagram, matriks, dan *catalog*. Pada penelitian ini dihasilkan 1 matriks yaitu *stakeholder map matriks*, 3 catalog yaitu *Principle Catalog*, *Business Requirement Catalog*, dan *Gap Analysis*, dan menghasilkan 4 diagram yang diantaranya adalah Peta Proses Bisnis Level 0, Peta Proses Bisnis Level 1, Peta Lintas Fungsi, dan Peta Aplikasi Eksisting/Proses Bisnis. Fase utama dalam perancangan ini adalah fase arsitektur proses bisnis yang menghasilkan artefak usulan berupa model peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, peta relasi, dan peta lintas fungsi sebagai standarisasi proses bisnis yang sesuai dengan arahan PemenpanRB No.19 tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis.

REFERENSI:

- [1] Pereira, G. V., Macadar, M. A., Luciano, E. M., & Testa, M. G. (2017). Delivering public value through open government data initiatives in a Smart City context. *Information Systems Frontiers*, 19(2), 213–229. <https://doi.org/10.1007/s10796-016-9673-7>
- [2] Guenduez, A. A., Singler, S., Tomczak, T., Schedler, K., & Oberli, M. (2018). Smart Government Success Factors. *Swiss Yearbook of Administrative Sciences*, 9(1), 96–110. <https://doi.org/10.5334/ssas.124>.
- [3] Welch, E. W., Hinnant, C. C., & Moon, M. J. (2005). Linking citizen satisfaction with e-government and trust in government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(3), 371–391. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui021>
- [4] Shanks, G. *et al.* (2018) 'Journal of Strategic Information Systems Achieving benefits with enterprise architecture', *Journal of Strategic Information Systems*, 27(2), pp. 139–156. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2018.03.001>
- [5] Costa, C. and Santos, M. Y. (2016) 'BASIS: A big data architecture for smart cities', *Proceedings of 2016 SAI Computing Conference, SAI 2016*, pp. 1247–1256. doi: 10.1109/SAI.2016.7556139.
- [6] Brackett, M. and Earley, S. (2008) *The DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK) Spanish Edition*. Available at: <https://books.google.com.co/books?id=7FdNCwAAQBAJ&pg=PT18&lpg=PT18&dq=las+organizaciones+que+no+entienden+la+gran+importancia+de+la+gesti3n+de+datos+y+la+informaci3n+como+activos+tangibles+en+la+nueva+econom3a+no+van+a+sobrevivir&source=bl&ots=9uflO1m79P&>.